

KONSEP MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA DALAM MASA POSTMODERN (SEBUAH ANALISIS KRITIS)

Suroto

PPKn, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Alamat e-mail: suroto_unlam@yahoo.com

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: (1) Pluralistik/keberagaman, (2) sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, (3) toleransi yang tinggi dan (4) memiliki sanksi moral. Karakteristik-karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. dunia pendidikan sebagai bagian dari pendidikan umat manusia haruslah senantiasa berpartisipasi untuk membangun terwujudnya masyarakat madani.

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang sedang berlangsung sekarang ini membawa dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi telah membatasi habis batas-batas yang mengisolasi kehidupan manusia. Karena itu, lahirlah apa yang disebut masyarakat terbuka (*open society*) dimana terjadi aliran bebas informasi, yakni manusia, perdagangan, serta berbagai bentuk-bentuk aktivitas kehidupan global lainnya yang dapat menyatukan umat manusia dari berbagai penjuru dunia.

Masyarakat mau tidak mau dengan terpaksa harus mau menyadari bahwa betapa pentingnya memperjuangkan hak-hak asasinya serta harus mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan dalam membangun keadaan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia mendatang di negara Indonesia ini sudah menjadi kelaziman apabila menjadi tanggung jawab bersama untuk memajukannya. Tanggung jawab tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab dari satu masyarakat atau oleh negara saja tetapi merupakan tanggung jawab kolaborasi, yakni

pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

Masyarakat yang diinginkan tentunya adalah masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju, dan modern atau yang lebih dikenal sebagai "*Civil Society*" (Masyarakat Madani) bukan sebagai masyarakat yang totaliter, yakni masyarakat yang menginjak-injak akan hak asasi manusianya sendiri. Masyarakat madani akan tersusun dari masyarakat-masyarakat madani lokal dengan berdasarkan pada kebudayaannya masing-masing.

Oleh karena itu, dunia pendidikan sebagai bagian dari pendidikan umat manusia haruslah senantiasa berpartisipasi untuk membangun terwujudnya masyarakat madani. Baru-baru ini hampir semua masyarakat diseluruh dunia menginginkan kehidupan demokrasi partisipatoris, yakni kehidupan masyarakat yang menghendaki rakyatnya supaya berkemampuan untuk ikut serta dalam membangun masyarakatnya sendiri. Perkembangan demokratisasi masyarakat ini tentunya menuntut suatu pendidikan yang sesuai. Sebab pendidikan merupakan bagian dari proses memasyarakatkan masyarakatnya

dengan kebudayaan yang konkrit, maka pembentukan masyarakat madani dengan sistem nilai yang ingin diwujudkan tidak terlepas dari konfigurasi nilai-nilai yang terdapat dalam kebudayaan setempat. Masalah ini bagi masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal yang wajar dengan realitas kebhinnekaan masyarakat dan budayanya.

B. Rumusan Masalah

Artikel ini membahas mengenai permasalahan pokok masyarakat madani di Indonesia, keadaan dan tantangannya ke depan. Karena itu, rumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep masyarakat madani.
2. Bagaimana karakter masyarakat Indonesia.
3. Apa hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
4. Bagaimana tantangan masyarakat madani di Indonesia ke depan.

C. Tujuan

Penulisan artikel ini ingin menggali lebih dalam mengenai fenomena kehidupan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan madani termasuk tantangan yang harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia sendiri. Lebih jelas tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui tentang konsep masyarakat madani.
2. Ingin mendalami tentang berbagai karakter masyarakat Indonesia yang dapat menopang kehidupan madani.
3. Ingin mengetahui hambatan-hambatan dalam mewujudkan masyarakat madani.
4. Ingin menganalisa tantangan masyarakat madani di Indonesia ke depan.

D. Apakah Masyarakat Madani itu?

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hakikat manusia mempunyai kesamaan, yakni karena kemanusiaannya. Di dalam kesamaan manusia itu dimungkinkan lahirnya kebudayaan. Dari situlah manusia dapat hidup mempertahankan eksistensinya dan bahkan berkembang membangun

kehidupannya melalui kerjasama dengan sesama manusia lain.

Dalam bahasa Arab konsep masyarakat Madani dikenal dengan istilah *al-mujtama' al-madani*, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *civil society*. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewargaan.

Civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Cicero yang memulai menggunakan istilah *Societas Civilis* dalam filsafat politiknya, yang berarti komunitas politik yang beradap, dan didalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Masyarakat madani merupakan konsep yang merujuk pada masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu masyarakat yang mengacau pada nilai-nilai kebijakan umum, yang disebut *al-khair*.

Berkenaan dengan pengertian masyarakat madani atau *civil society*, beberapa ahli saling mengemukakan pandangannya yang tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, diantaranya sebagai berikut: Hikam (Supriatna) berpendapat bahwa *civil society* secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.

Gallner (Supriatna), menunjuk konsep *civil society* sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Victor Perez-Diaz, menyatakan bahwa *civil society* lebih menekankan pada keadaan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan, mempunyai sistem ekonomi pasar dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menompang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara umum masyarakat madani atau *civil society* dapat diartikan

sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk mewujudkan cita-cita ke arah masyarakat madani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan berbagai prasyarat sebagaimana diungkapkan oleh Han Sung-Jun:

1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.
2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam mengartikulasikan isu-isu politik.
3. Terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu.
4. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi.

Masyarakat madani (*civil society*) sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk masyarakat lainnya. Menurut A.S Hikam ada empat ciri utama dari masyarakat madani, yaitu sebagai berikut :

1. Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2. Keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya.
3. Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.

4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.

Sementara itu Nurcholis Madjid dalam sudut pandang lain mengemukakan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut:

1. Semangat egalitarianisme atau kesetaraan.
2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan kesukuan, ras, dan lain-lain.
3. Keterbukaan.
4. Partisipasi seluruh anggota masyarakat.
5. Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.

Sedangkan Hidayat Syarif berpandangan bahwa masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Pancasila, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan.
2. Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat.
3. Masyarakat yang menghargai Hak Azasi Manusia (HAM).
4. Masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum.
5. Masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dan kemandirian.
6. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralis).

E. Masyarakat Madani di Indonesia

Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: (1) Pluralistik/keberagaman, (2) sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, (3) toleransi yang tinggi dan (4) memiliki sanksi moral.

Karakteristik-karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat madani model Indonesia nantinya. Keberadaan masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis perwujudan

masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai dicita-citakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Pada masa demokrasi terpimpin politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Sehingga perkembangan pemikiran menuju masyarakat madani kembali terhambat.

Perkembangan orde lama dan munculnya orde baru memunculkan secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa orde baru, dalam bidang sosial-ekonomi tercipta pertumbuhan ekonomi, tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan makin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan dalam bidang politik, orde baru memperkuat posisi negara di segala bidang, intervensi negara yang kuat dan jauh terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan. Hal tersebut berakibat pada terjadinya kemerosotan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat serta menyempitkan ruang-ruang bebas yang dahulu pernah ada, sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegelapan.

Setelah orde baru tumbang dan diganti oleh era reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menorehkan secercah harapan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal

pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara yang intinya mengarahkan pada aspek kemandirian dari setiap warga negara.

Dari zaman orde lama sampai era reformasi saat ini, permasalahan perwujudan masyarakat madani di Indonesia selalu menunjukkan hal yang sama. Beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Semakin berkembangnya orang "miskin" dan orang yang merasa miskin.
2. LSM dan partai politik muncul bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan sehingga memungkinkan berbagai "ketidakjelasan".
3. Pers berkembang pesat dan semakin canggih tetapi justru "fesimisme" masyarakat yang terjadi.
4. Kaum cendekiawan semakin banyak tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan.
5. Kurang pede untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri.

Mencermati keadaan sekarang, maka diperlukan sebuah strategi jitu untuk mencapai kehidupan yang madani. Proses pemberdayaan tersebut menurut Dawam Rahardjo dapat dilakukan dengan tiga model strategi sebagaimana sebagai berikut :

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.
3. Strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahardjo, penulis berasumsi bahwa untuk mencapai kehidupan madani diperlukan beberapa suplemen sebagai berikut:

1. Tanamkan nilai religiusme yang didukung oleh jaminan keamanan.
2. Tanamkan semangat insan pancasilais.
3. Berdayakan kaum cendekiawan/alumni luar negeri bangsa Indonesia melalui pemberian peran riil.

4. Sanksi tegas terhadap penyelewengan kekuasaan dan anggaran tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menuju masyarakat madani Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat (revolusi), tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat (evolusi), yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Melalui era reformasi bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk membina suatu masyarakat Indonesia baru dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi tahun 1945 yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani ala Indonesia merupakan visi dari gerakan reformasi dan juga visi dari reformasi sistem pendidikan nasional.

Gerakan untuk membentuk masyarakat madani berkaitan dengan proses demokratisasi yang sedang melanda dunia dewasa ini. Sudah tentu perwujudan kehidupan yang demokratis untuk setiap bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu di samping ciri-ciri universal. Salah satu ciri dari kehidupan bermasyarakat Indonesia ialah kebhinnekaan dari bangsa Indonesia. Pada masa orde baru unsur kebhinnekaan itu cenderung dikesampingkan dan menekankan sifat kesatuan bangsa. Padahal justru dalam kebhinnekaan itulah terletak kekuatan dari persatuan bangsa Indonesia.

Orde Baru telah menghilangkan kekuatan kebhinnekaan itu dan mencoba menyusun suatu masyarakat yang uniform sehingga terciptalah suatu struktur kekuasaan yang sangat sentralistik dan birokratik. Hal ini justru telah mengakibatkan disintegrasi bangsa kita karena dalam usaha menekankan persatuan yang mengesampingkan perbedaan melalui cara-cara represif, berakibat mematikan inisiatif dan kebebasan berpikir serta bertindak robotik

di dalam pembangunan bangsa. Cita-cita reformasi yang diinginkan ialah mengakui adanya kebhinnekaan sebagai modal utama bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan suatu masyarakat madani yang menghargai akan perbedaan sebagai kekuatan bangsa dan sebagai identitas bangsa Indonesia yang secara kultural sangat kaya dan bervariasi.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa cita-cita membentuk masyarakat madani harus menjadi cita-cita yang serius bagi bangsa Indonesia sejalan dengan berkembangnya kehidupan berdemokrasi. bahkan ide masyarakat madani telah mulai dikembangkan sejak jaman Yunani klasik seperti ahli pikir Cicero.

Setelah mencermati berbagai ciri masyarakat madani, maka tampak dengan jelas bahwa masyarakat madani adalah suatu masyarakat demokratis dan menghargai *human dignity* atau hak-hak dan tanggung jawab manusia. Melihat keadaan masyarakat dan bangsa Indonesia maka ada beberapa prinsip khas yang perlu kita perhatikan dalam membangun masyarakat madani di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut ialah:

- a. Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.
- b. Pentingnya adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh filosof Isaiah Berlin, yang diperlukan di dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai. Justru yang penting di dalam masyarakat yang bhinneka ialah adanya saling pengertian. Konflik nilai-nilai justru merupakan dinamika dari suatu kehidupan bersama di dalam masyarakat madani. Konflik nilai-nilai tidak selalu berarti hancurnya suatu kehidupan bersama. Dalam masyarakat demokratis, konflik nilai akan memperkaya horison pandangan dari setiap anggota.
- c. Berkaitan dengan kedua ciri khas tadi ialah toleransi yang tinggi. Dengan

demikian masyarakat madani Indonesia bukanlah masyarakat yang terbentuk atau dibentuk melalui proses indoktrinasi tetapi pengetahuan akan kebhinnekaan dan penghayatan terhadap adanya kebhinnekaan tersebut sebagai unsur penting dalam pembangunan kebudayaan nasional.

- d. Akhirnya untuk melaksanakan nilai-nilai yang khas tersebut diperlukan suatu wadah kehidupan bersama yang diwarnai oleh adanya kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum sifat-sifat toleransi dan saling pengertian antara sesama anggota masyarakat pasti tidak dapat diwujudkan.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dikatakan telah berhasil mencapai kehidupan madani apabila didalamnya telah memiliki:

1. Keimanan dan ketaqwaan yang kokoh.
2. Berpendidikan maksimal (berkualitas).
3. Kembali menjadi insan Pancasila.
4. Memiliki cita-cita (komitmen) dan harapan (secara kolektif) untuk setara dengan negara-negara maju.
5. Memiliki kepercayaan diri untuk bersaing.
6. Loyalitas terhadap bangsa dan negara Indonesia (bukan terhadap partai politik saja).

F. Tantangan Masyarakat Madani di Indonesia

Masyarakat madani merupakan suatu kondisi yang senantiasa diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat di negara Indonesia. Karena itu, tantangan yang harus mampu dilakukan oleh seluruh masyarakat supaya tercapai kehidupan madani adalah:

1. Sikap demokratis

Mengembangkan sikap demokratis bukan hanya mengenai pembentukan individu yang mempunyai harga diri, yang berbudaya, yang memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia yang bhinneka, tetapi juga menumbuhkan sikap demokratis tersebut perlu didukung oleh suatu sistem yang juga mengembangkan sikap demokratis. Sistem pendidikan yang

hanya mementingkan sekelompok manusia seperti manusia yang berinteligensi tinggi saja, tentunya tidak demokratis sifatnya. Demikian pula proses belajar yang tidak menumbuhkan sikap kreatif dan bebas serta sanggup mengemukakan pendapat, berbeda pendapat, dan menghargai pendapat yang

lebih baik, perlu dimasukkan di dalam proses belajar serta kurikulum. Demikian pula para pendidik, para dosen yang otokratis tidak memungkinkan tumbuhnya sikap demokratis dari para peserta didik.

2. Sikap toleran

Wajah budaya Indonesia yang bhinneka menuntut sikap toleran yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat sehingga terbentuk suatu masyarakat yang kompak tapi beragam sehingga kaya akan ide-ide baru. Di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesian Council on World Affairs (ICWA) Maret 1999, Juwono Sudarsono mengemukakan di samping sikap toleransi juga penting sikap kompromi perlu dikembangkan dalam pendidikan.

3. Saling pengertian

Di dalam suatu masyarakat demokrasi, perbedaan pendapat justru merupakan suatu hikmah untuk membentuk suatu masyarakat yang mempunyai horizon yang luas dan kaya. Untuk keperluan tersebut diperlukan pengetahuan dan penghayatan mengenai kebhinnekaan tersebut. Pendidikan nasional harus menampung akan kebutuhan masyarakat yang beragam tersebut. Keanekaragaman budaya daerah haruslah dikembangkan seoptimal mungkin sehingga pada gilirannya dapat memberikan sumbangan kepada terwujudnya suatu budaya nasional, budaya Indonesia. Saling pengertian hanya dapat ditumbuhkan apabila komunikasi antarpenduduk dan antar etnis

dapat terwujud dengan bebas dan intens. Oleh sebab itu pengembangan budaya daerah, pertukaran kunjungan antar masyarakat dan budaya daerah haruslah diintensifkan.

4. Berakhlak tinggi, beriman dan bertaqwa
Masyarakat Indonesia yang bhinneka dengan beragam nilai-nilai budayanya, namun merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia, adalah masyarakat yang beriman. Manusia yang beriman adalah manusia yang berakhlak tinggi oleh karena semua agama yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi. Keragaman agama yang hidup dan berkembang di Indonesia menuntut sikap toleransi dan saling pengertian setiap anggotanya. Oleh sebab itu pendidikan agama di dalam sistem pendidikan nasional haruslah dilaksanakan begitu rupa sehingga terwujudlah suatu kehidupan bersama yang mengandung unsur-unsur toleransi serta saling pengertian yang mendalam. Kita perlu menghindari ramalan Huntington yang memprediksikan adanya konflik-konflik budaya dan agama sebagai pengganti konflik kekerasan senjata dalam kehidupan umat manusia pada melenium ketiga yang akan datang.
5. Manusia dan masyarakat yang berwawasan global
Masyarakat Indonesia memasuki suatu kehidupan baru dalam melenium ketiga yaitu masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi serta perdagangan bebas. Kehidupan global tersebut memberikan kesempatan-kesempatan yang baru tetapi juga tantangan-tantangan yang semakin sulit dan kompleks sehingga meminta kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bukan saja menguasai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga yang terampil di dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul akibat gelombang globalisasi tersebut. Menurut pengamatan UNESCO terdapat beberapa

bahaya yang inheren di dalam gelombang globalisasi yang perlu diwaspadai dalam proses pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut ialah regionisasi, polarisasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Gelombang globalisasi juga telah melahirkan berbagai kerjasama regional yang pada gilirannya menuntut program dan langkah-langkah yang, sesuai di dalam pendidikan nasional anggota kerjasama regional tersebut. Dengan demikian regionisasi akan memberikan keuntungan tetapi juga malapetaka bagi anggota kerjasama regional yang tidak mempersiapkan diri sehingga hanya akan menguntungkan anggota-anggota yang lebih siap. Globalisasi juga dapat menyebabkan polarisasi antara negara yang maju dan negara berkembang. Oleh sebab itu negara berkembang harus pandai-pandai mempersiapkan diri sehingga tidak akan menjadi mangsa dari kekuatan global yang lebih kuat. Akibatnya ialah pemiskinan negara-negara yang dilindas oleh kekuatan-kekuatan global seperti di dalam ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya, gelombang globalisasi dapat menjadikan sekelompok manusia tercecer atau terbuang dari arus perubahan Proses marginalisasi kita rasakan di dalam era krisis moneter yang telah mengakibatkan sejumlah besar rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu pendidikan nasional harus, mempunyai visi untuk dapat memberdayakan rakyat banyak sehingga rentan terhadap perubahan-perubahan global yang menyimpannya Sejalan dengan kekuatan-kekuatan yang disebut tadi, juga globalisasi dapat menyebabkan fragmentalisasi masyarakat Indonesia di dalam kelompok-kelompok yang diuntungkan dan kelompok-kelompok yang dikalahkan akibat kepentingan-kepentingan tertentu. Demikian pula tumbuh-suburnya proses demokrasi dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bertanah air sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia dapat

terpecah belah menjadi masyarakat yang lemah. Sistem pendidikan nasional mempunyai tugas untuk melihat secara dini masalah-masalah tersebut di atas agar supaya dapat mempersiapkan manusia dan masyarakat Indonesia untuk lebih siap menghadapi tantangan-tantangan global tersebut.

G. Kesimpulan

1. Masyarakat madani atau *civil society* dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
2. Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: (1) Pluralistik/keberagaman, (2) sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, (3) toleransi yang tinggi dan (4) memiliki sanksi moral.
3. Beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia, yaitu sebagai berikut : (a) semakin berkembangnya orang "miskin" dan orang yang merasa miskin, (b) LSM dan partai politik muncul bagaikan jamur yang tumbuh di musim penghujan sehingga memungkinkan berbagai "ketidakjelasan", (c) pers berkembang pesat dan semakin canggih tetapi justru "fesimisme" masyarakat yang terjadi, (d) kaum cendekiawan semakin banyak tetapi cenderung berorientasi pada kekuasaan, (e) kurang pede untuk bersaing dan senantiasa merasa rendah diri.
4. Tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia ke depan adalah (1) sikap demokratis, (2) sikap toleran, (3) saling pengertian, (4) berakhlak tinggi, beriman dan bertaqwa, (5) berwawasan global.

Ahdiyana, Mahrita, 2009. *Pemilu Sebagai Wahana Pendidikan Politik* (Pidato Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis XXX STIA-AAN Yogyakarta). Yogyakarta: tidak diterbitkan.

Brownhill, Robert and Smart Patricia, 1989. *Political Education*. London: New Fetter Lane.

Huda, Nurul, *Urgensi Pendidikan Politik*. (On line). <http://pemudapemimpin.blogspot.com/p/urgensi-pendidikan-politik.html?zx=c9d0a8073bc19230>. Diakses tanggal 28 September 2011.

Lutfiah, 2007. *Urgensi Pendidikan dalam Budaya Politik*. (On line). <http://insaniaku.files.wordpress.com/2009/03/2-urgensi-pendidikan-dalambudaya-politik-lutfiyah.pdf>. diakses tanggal 28 September 2011.

Nasiwan, 2005. *Model Pendidikan Politik: Studi Kasus PKS DPD Sleman, Yogyakarta*. Yogyakarta : Cakrawala Pendidikan

Roqib, Muh, 2010. *Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik*. (On line) <http://makalah-gratis.blogspot.com/2010/03/makalah-pendidikan-politik-pendidikan.html>. Diakses tanggal 28 September 2011.

Sumantri, Endang, 1993. *Pendidikan Moral: Suatu Tinjauan dari Sudut Konstruksi dan Proposisi*. Bandung: Tidak diterbitkan.

Sumantri, Endang. 2008. *An Outline Citizenship and Moral Education in Major Countries of Southeast Asia*. Bandung: Bintang Warliartika.

Supriatna, Nana, (.....). *Hakikat Masyarakat Madani*. (On-line) Tersedia: <http://frog-belajar.blogspot.com/2010/12/hakikat-masyarakat-madani.html>. Diakses tanggal 28 September 2011

H. Daftar Pustaka